



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEMUTAKHIRAN DAN PROSES MENUJU PENETAPAN DPT PEMILU 2024

Juniar Laraswanda Umagapi
Analisis Legislatif Ahli Pertama
juniar.umagapi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Pada tanggal 20 dan 21 Juni 2023, KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, di 514 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi dan 128 PPLN telah melakukan kegiatan penetapan daftar pemilih tetap untuk keperluan Pemilu 2024.

Secara berjenjang, rekapitulasi DPT akan dilakukan di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Rekapitulasi DPT di KPU Pusat akan dilakukan pada 2-4 Juli 2023, termasuk merekapitulasi daftar pemilih yang ada di luar negeri. Ada dua sumber data dalam penetapan DPT pada Pemilu 2024, yaitu, DPT yang dimiliki KPU di pemilu terakhir, yaitu Pemilu 2019; dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) milik Kemendagri. Adanya dua sumber data ini memungkinkan adanya data ganda yang muncul. Bahkan, KPU RI menegaskan telah menghapus 1,2 juta data ganda pemilih 2024 yang tercantum di dalam DPT yang direkapitulasi oleh jajaran tingkat kabupaten/kota.

Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos, membantah pernyataan Bawaslu RI soal pihaknya secara tiba-tiba menambah data pemilih daerah. Dia menegaskan KPU hanya melakukan koreksi data. Data dari Dukcapil salah satunya digunakan untuk mencoret orang yang sudah meninggal dari daftar pemilih. Data perubahan status penduduk dari Dukcapil dan TNI/Polri digunakan untuk mencoret nama warga yang baru menjadi tentara atau polisi dari daftar pemilih. Data tersebut juga digunakan untuk memasukkan pensiunan TNI/Polri yang belum tercatat ke dalam daftar pemilih. KPU juga telah mencoret hampir semua warga yang belum berusia 17 tahun yang belum menikah dari daftar pemilih. Berawal dari sekitar 10 ribu orang yang belum memenuhi syarat usia, kini hanya tersisa 450 orang yang masih tercatat dalam daftar pemilih.

Masyarakat juga dapat terlibat aktif dalam menghindari kecurangan dengan mengakses langsung melalui cekdptonline.kpu.go.id untuk mengecek apakah sudah terdaftar menjadi pemilih pada Pemilu 2024. KPU akan menjaga hak pilih warga negara dalam Pemilu 2024. Salah satu caranya dengan pendirian TPS khusus di lokasi perkebunan, pertambangan, dan pesantren.

Proses pemutakhiran data pemilih sangat penting untuk menjamin hak pemilih untuk dapat memilih siapapun yang diinginkan sesuai kemauan masing-masing pemilih. Meskipun demikian, disadari juga bahwa data pemilih juga berpotensi untuk digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), karena salah satu gugatan paling banyak di MK yaitu soal daftar pemilih. Oleh karena itu, sudah seharusnya Bawaslu melakukan tahapan pencegahan agar masyarakat dapat mengecek sebagai DPT.

Atensi DPR

Pelaksanaan Pemilu 2024 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk informasi jadwal dan tahapan Pemilu 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan PKPU tersebut, Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Tahapan Pemilu telah dimulai, KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Selanjutnya, rekapitulasi DPT dilakukan di tingkat provinsi dan nasional. Komisi II DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan, perlu terus memantau persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Komisi II juga perlu mendorong sinergitas para penyelenggara pemilu sebagai upaya *check and balance* atas tugas dan wewenang masing-masing. KPU dan Kemendagri perlu bersinergi untuk memastikan data ganda pemilih tetap tidak terjadi. Komisi II juga memastikan penyelenggara Pemilu mengedepankan dan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas, agar Pemilu dapat berjalan dengan baik sebagaimana harapan masyarakat Indonesia.

Sumber

cnnindonesia.com., 23 Juni 2023;
dpr.go.id., 21 Juni 2023;
news.republika.co.id., 23 Juni 2023; dan
Rakyat Merdeka, 22 dan 23 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023